



**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI**

=====

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Bumdesa Sarining Winangun Kuku, Desa Kuku, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada tanggal 12 – 16 Juli 2024. Kunjungan ini dipimpin oleh Ir. Ridwan Bae dan dihadiri oleh beberapa anggota Komisi V DPR RI; pejabat dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; pejabat dari Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan; Kepala Desa Kuku; pengurus Bumdesa dan beberapa tenaga pendamping desa.

Fokus utama Kunjungan Kerja ini adalah untuk melihat secara langsung pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa, khususnya pengembangan Bumdesa untuk memperkuat penataan kehidupan ekonomi dan investasi di desa. Menurut data yang diperoleh di lapangan, Bumdesa Sarining Winangun Kuku telah memiliki 3 (tiga) unit usaha, yakni Unit Usaha Perdagangan Grosir, Unit Usaha Produksi (Beras), dan Unit Usaha Bidang Jasa. Dalam perencanaannya, tahun 2025, Bumdesa ini akan mengembangkan unit usaha Wisata Desa dengan basis pemberdayaan potensi lokal desa.

Untuk menjalankan usahanya, Bumdesa ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain dengan BRI, Bank Pembangunan Daerah Bali, Samsat Tabanan, Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan untuk pengadaan sembako bantuan sosial, koperasi dan restoran untuk penjualan beras, serta pihak swasta untuk bahan sembako dan internet.

Kendala yang dihadapi oleh pengelola Bumdesa saat ini adalah Bumdesa belum memiliki gedung pertokoan dan gudang Bumdesa yang sesuai dengan kebutuhan; belum memiliki kendaraan operasional; kebutuhan modal yang lebih besar untuk mengembangkan Unit Usaha; rekrutmen SDM pengelola Bumdesa yang cukup susah; dan pajak Bumdesa yang berbadan hukum ditetapkan terlalu besar oleh Pemerintah.

Pada kesempatan Kunjungan Kerja tersebut, Komisi V DPR RI mengapresiasi kinerja pengurus atas sejumlah prestasinya dalam mengelola Bumdesa tersebut. Disamping itu, diharapkan agar Bumdesa yang telah sukses seperti ini dapat menjadi *pilot project* yang harus dikembangkan di desa lain di Indonesia, baik dari segi perencanaan, transparansi keuangan dan pemasaran produk ke masyarakat.

Selain itu, Komisi V DPR RI meminta agar Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi harus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Bumdesa ini, terutama untuk mengkonsolidasikan aset, fasilitasi permodalan, peningkatan SDM lokal dan jaringan kerjasama/*marketing* dengan pihak terkait. Selain itu, diharapkan agar Bumdesa harus dikelola secara profesional untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan demi terwujudnya ekonomi kerakyatan dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Tabanan, 12 Juli 2024

Tim Kunker Reses ke Kab. Tabanan Prov. Bali